

# TINJAUAN IMPLEMENTANSI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PROPINSI LAMPUNG

Oleh :  
**YULITA ZANARIA**  
yulitalampung@yahoo.co.id  
Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRAK

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap teori dan menjadi bahan pertimbangan serta kebijakan bagi pemerintah dalam penerapan suatu sistem untuk meningkatkan kinerja. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui penyebaran atau antar langsung kepada pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi responden di Provinsi Lampung yang sekaligus merupakan populasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kendala implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja pemerintah daerah pada pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Lampung.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *sensus Sampling*. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.

Kata kunci : *Akuntansi berbasis akrual, kendala, kinerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Lampung*

## I. PENDAHULUAN

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Perkembangan sektor publik di Propinsi Lampung berkembang mengikuti laju dan aturan dan pemerintah.

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et, al. 2007).

Reformasi manajemen organisasi sektor publik bidang keuangan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.

Pada PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (*full accrual*) adalah tahun 2015. Namun kenyataannya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut menjadi kendala bagi sebagian besar Pemerintah Daerah/Kota di Indonesia termasuk Pemerintah di Provinsi Lampung. Penelitian ini mencoba menelaah kendala apa yang menyebabkan sulitnya implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Propinsi Lampung, serta bagaimana dampak kendala tersebut terhadap target waktu kinerja pegawai di Propinsi Lampung.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi kendala utama dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual?
2. Bagaimana kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010?

### 1.3. Tujuan penelitian

1. Mengetahui dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual
2. Mencari bukti empiris tentang kesiapan Pemerintah Propinsi Lampung dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010

## II. KAJIAN TEORITIS


### 2.1. Profile Propinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km<sup>2</sup> dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.

#### a. Politik dan Pemerintahan

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (empat belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

No	Kabupaten /Kota	Pusat Pemerintahan	Bupati /Walikota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Logo
1	Kabupaten Lampung Barat	Liwa	Mukhlis Basri	15	5/131	

2	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	Zainudin Hasan	17	4/256	
3	Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih	Mustafa	28	10/301	
4	Kabupaten Lampung Timur	Sukadana	Chusnunia Chalim	24	-/264	
5	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi	Agung Ilmu Mangkunegara	23	15/232	
6	Kabupaten Mesuji	Mesuji	Khamamik	7	-/105	
7	Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan	Dendi Ramadhona	11	-/144	
8	Kabupaten Pesisir Barat	Krui	Agus Istiqlal	11	2/116	
9	Kabupaten Pringsewu	Pringsewu	Sujadi Saddat	9	5/126	

10	Kabupaten Tanggamus	Kota Agung	Bambang Kurniawan	20	3/299	
11	Kabupaten Tulang Bawang	Menggala	Hanan A. Rozak	15	4/147	
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Umar Ahmad	8	3/93	
13	Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu	Raden Adipati Surya	14	6/221	
14	Kota Bandar Lampung	-	Herman HN	20	126/-	
15	Kota Metro	-	A. Pairin	5	22/-	

## 2.2. Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal

Sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 semua Pemerintahan Daerah sudah dituntut untuk mulai menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual. Demikian halnya Provinsi Lampung selalu berupaya untuk menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 800/527/II.10/2016 Tanggal 19/02/2016, Gubernur menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat menempatkan PNS yang memiliki Kompetensi Akademik

Akutansi (KAA) dan yang telah mengikuti Diklat Akutansi/Pengelolaan Keuangan Daerah dan sejenisnya, pada Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menangani pengelolaan keuangan.

Begitu juga dengan Kabupaten/Kota yang berada di bawah Provinsi Lampung juga mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual, dan langkah awal dari persiapan itu adalah mempersiapkan Peraturan yang terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Beberapa Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- Provinsi Bandar Lampung  
Beberapa Peraturan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang ada di Provinsi Bandar Lampung yaitu:
  - PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
  - Peraturan Daerah mengenai SAP Sistem Akuntansi Berbasis Akrual yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 12 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
  - Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Kabupaten Lampung Selatan  
Peraturan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yaitu:
  - Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 12 dan No. 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Kabupaten Lampung Timur  
Peraturan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang ada di Kabupaten Lampung Timur yaitu
  - Peraturan Bupati Lampung Timur No. 39 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
  - Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Kabupaten Lampung Tengah  
Peraturan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu
  - *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
- Kota Metro  
Peraturan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang ada di Kota Metro yaitu
  - Peraturan Walikota Metro No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual,
  - Peraturan Walikota Metro No 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual
  - Peraturan Walikota Metro No 15 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual.

- Surat Edaran Walikota Metro No 900/1019/LTD-5/2014 tentang perubahan dan penyesuaian kode rekening anggaran pendapatan dan belanja pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu model penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Ruang lingkup penelitian ini meliputi dua segi, segi kewilayahan dan segi substansi (isi).

#### **3.2. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Kuesioner diberikan kepada seluruh pegawai pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kriteria sampel yang diambil. Wawancara mendalam dilakukan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung dan pegawai struktural lainnya.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat dari hasil publikasi, baik dari instansi pemerintah, buku, jurnal dan situs internet. Dengan demikian, metode pengumpulan data secara variatif menggunakan beberapa teknik, tergantung pada data yang dikehendaki dan sumber data.

Objek dalam penelitian ini adalah 5 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Kelima Kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kota Metro.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuisisioner yang dikirim dan diambil langsung kepada responden. Rentangan waktu penyebaran dan pengumpulan kuisisioner adalah dari tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 29 Juli 2016. Tingkat pengembalian kuisisioner (*respond rate*) sebesar 100% karena diambil secara langsung kepada responden sehingga dapat tepat waktu. Selain menggunakan kuisisioner, metode pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan wawancara. Dari hasil wawancara dan jawaban para responden diketahui kendala utama dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

### **IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kendala utama dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Propinsi Lampung**

Objek dalam penelitian ini adalah 5 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Kelima Kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kota Metro.

Kuisisioner diantarkan dan dijemput langsung kepada responden. Rentangan waktu penyebaran dan pengumpulan kuisisioner adalah dari tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 29 Juli 2016. Tingkat pengembalian kuisisioner (*respond rate*) sebesar 100% karena diambil secara langsung kepada responden sehingga dapat tepat waktu.

Selain menggunakan kuisisioner, metode pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan wawancara. Dari hasil wawancara dan jawaban para responden diketahui

kendala utama dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan kabupaten/kota sebagai berikut:

### **1. Pemerintah Kota Bandar Lampung**

Perubahan peraturan yang relatif singkat, proses penyebaran informasi dan sosialisasi yang lambat, kompleksitas laporan keuangan basis akrual merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan basis akrual. Namun demikian, pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kekuatan yaitu:

- a) Pendapatan dan beban diakui saat terjadi transaksi walaupun kas belum diterima/dikeluarkan. Konsep ini memungkinkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung mengidentifikasi seluruh sumber/potensi pendapatan maupun biaya yang terjadi.
- b) Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus langsung tetapi harus dihitung dalam estimasi piutang tak tertagih. Hal ini akan memungkinkan pihak pemerintah menghitung nilai piutang yang sesungguhnya.
- c) Piutang dan beban disajikan dalam periode yang sama (*matching concept*)

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan sosialisasi basis akrual kepada seluruh satuan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan berkala, melakukan kerja sama dengan seluruh satuan kerja, dan melakukan konsultasi dengan entitas lain yang lebih berpengalaman.

### **2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan**

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda dan memiliki luas wilayah 2.109,74 km<sup>2</sup>. Mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, masih menemukan berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi yaitu:

- a) Belum terintegrasinya sistem manajemen pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan.
- b) Manfaat basis akrual belum dipahami oleh stakeholders
- c) Adanya anggapan/opini bahwa sistem akuntansi berbasis akrual itu susah dan tidak penting

Namun demikian, terdapat beberapa kekuatan yang mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu: komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua pihak dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan terbukanya peluang formasi baru untuk lulusan akuntansi.

### **3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat Pemerintahan di Kecamatan Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.300 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah Bepadan"

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah Kabupaten Lampung Timur menemukan beberapa kendala seperti: teknologi informasi belum banyak dikenal dalam pelaporan keuangan dalam pemerintahan sehingga proses adaptasi berjalan lambat, dan kurangnya SDM berlatar belakang akuntansi. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki keunggulan yakni: Aset dan kewajiban disajikan lebih rasional dan dapat menggambarkan potensi manfaat masa depan yang diperkirakan diperoleh dan pengorbanan sumber daya akibat masa lalu yang terjadi. Selain itu juga adanya peluang untuk pegawai mengikuti pelatihan/diklat.

#### **4. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah**

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.189,50 km<sup>2</sup>. Karena sebelum tahun 1999 ibukota Lampung Tengah terletak di Metro yang dimekarkan menjadi kota madya mandiri, maka dipindahkanlah pusat pemerintahan Lampung Tengah ke Gunung Sugih.

Dalam hal penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, masih menemukan beberapa kendala antara lain:

- a) Kurangnya SDM yang memahami mengenai sistem akuntansi berbasis akrual sehingga memerlukan kompetensi baru bagi SDM yang sudah ada atau menghadirkan tenaga baru yang lebih memahami sistem akuntansi tersebut.
- b) Laporan keuangan masih belum menggunakan sistem akuntansi akrual sepenuhnya karena sebagian masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.
- c) Keengganan pegawai untuk mempelajari hal baru yaitu sistem akuntansi berbasis akrual.

Meskipun masih terdapat beberapa kendala di atas, namun Peraturan perundang-undangan yang sudah lengkap sebagai pendukung dari implementasi sistem akuntansi berbasis akrual menjadi kekuatan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

#### **5. Pemerintah Kota Metro**

Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di provinsi Lampung dan berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi). Sebelum menjadi kota otonom, Metro merupakan kota administratif yang berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Metro dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual sebagai berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas SDM dalam aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual.
- b) Tingkat pengalaman pegawai dalam aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual.
- c) Banyaknya SKPD.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah Kota Metro melakukan beberapa hal antara lain: Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, Melaksanakan persiapan dan pematapan instrumen untuk pengakuan standardisasi kualitas manajemen pelayanan keuangan daerah. Melaksanakan penyesuaian program dan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari basis kas kepada basis akrual, sekaligus transfer keterampilan mengoperasikan peralatan tersebut kepada Tim Admin SIPKD BPKAD Kota Metro.

#### **4.2. Identifikasi Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual.**

Pada dasarnya semua Pemerintahan Daerah sudah dituntut untuk mulai menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010, namun pada kenyataannya sebagian Pemerintahan Daerah masih menganggap bahwa sistem akuntansi berbasis akrual adalah sesuatu yang susah, ribet dan sukar dipahami sehingga menjadi momok bagi para pegawai itu sendiri.

Namun Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung tetap melakukan persiapan-persiapan untuk implementasi sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh dan merata keseluruhan Kabupaten dan Kota. Beberapa bentuk persiapan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi sample dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:



1. Pemerintah Kota Bandar Lampung
  - a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 

Pada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadapi implementasi sistem akrual basis secara utuh telah mempersiapkan diri lebih matang dengan adanya Peraturan atau Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar semua dinas/instansi terkait segera mempersiapkan diri dalam menghadapi hal tersebut. Peraturan dan Undang-undang terkait dengan implementasi sistem akrual basis di Pemerintah Kota Bandar Lampung diantaranya sebagai berikut:

    - PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
    - Peraturan Daerah mengenai SAP Sistem Akuntansi Berbasis Akrual yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 12 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
    - Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung
  - b) Kesiapan Sumber Daya Manusia
 

Selain mempersiapkan diri dengan adanya Peraturan dan Undang-undang Daerah, maka langkah yang dilakukan Kota Bandar Lampung adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusianya juga sebagai user dari implementasi sistem akrual basis. Langkah persiapan SDM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Peningkatan kualitas SDM yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual baik di tingkat SKPD maupun Pemerintah Daerah melalui Training, Diklat dan Sosialisasi
  - c) Kesiapan Teknologi
 

Selain persiapan Peraturan, Sumber Daya Manusia dan yang tidak kalah penting adalah adanya persiapan dibidang Teknologi sebagai jembatan/alat untuk implementasi dari sistem akrual basis. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa teknologi yang ada dan tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mendukung adanya implementasi sistem akrual basis secara penuh sehingga tinggal menjalankannya saja.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
 

Kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diantaranya sebagai berikut:

  - a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 

Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi implementasi sistem akrual basis yaitu dengan adanya Peraturan atau Perundang-undangan terkait dengan hal tersebut yaitu dengan adanya Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 12 dan No. 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015.
  - b) Kesiapan Sumber Daya Manusia
 

Selain kesiapan dengan adanya Peraturan dan Undang-undang Daerah, maka langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi sistem akuntansi berbasis akrual di seluruh dinas dan instansi terkait yang berada di Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

- c) Kesiapan Teknologi  
Selain persiapan Peraturan, Sumber Daya Manusia dan yang tidak kalah penting adalah adanya persiapan dibidang Teknologi namun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa teknologi yang ada saat ini belum memadai untuk implementasi sistem akrual basis secara penuh sehingga perlu adanya peningkatan dan pengadaan teknologi yang lebih baik untuk menunjang implementasi sistem akrual basis di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diantaranya sebagai berikut:
- a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku  
Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi implementasi sistem akrual basis yaitu dengan adanya Peraturan atau Perundang-undangan terkait dengan hal tersebut diantaranya:
- Peraturan Bupati Lampung Timur No. 39 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
  - Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- b) Kesiapan Sumber Daya Manusia  
Selain kesiapan dengan adanya Peraturan dan Undang-undang Daerah, maka langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia yaitu dengan cara mengadakan diklat dan Bintek sistem akuntansi akrual.
- c) Kesiapan Teknologi  
Sedangkan persiapan di bidang teknologi pada Kabupaten Lampung Timur menyatakan bahwa Infrastruktur yang dibutuhkan sudah tersedia namun belum memadai sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur tersebut sehingga akan lebih memadai dan siap untuk digunakan untuk implementasi sistem akrual basis secara menyeluruh.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  
Kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi persiapan implementasi sistem akrual basis yaitu diantaranya sebagai berikut:
- a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku  
Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam bidang Peraturan atau Perundang-undangan lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan belum menerbitkan Peraturan Daerah mengenai hal tersebut.
- b) Kesiapan Sumber Daya Manusia  
Sedangkan persiapan dari bidang sumber daya manusia sebagai user dari sistem tersebut yaitu merangkul stakeholder terkait Project Charter, melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi sistem akuntansi berbasis akrual sehingga nantinya diharapkan ketika sistem itu diaplikasikan secara menyeluruh maka sumber daya manusia yang ada sudah siap dan mumpuni.

- c) Kesiapan Teknologi  
Sedangkan persiapan di bidang teknologi pada Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa Implementasi Sistem Informasi untuk mempermudah penyusunan Laporan Keuangan dan secara infrastruktur akan terus ditingkatkan untuk mendukung implementasi sistem akrual basis.
5. Pemerintah Kota Metro  
Kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam menghadapi implementasi sistem akrual basis yaitu diantaranya sebagai berikut:
- a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku  
Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam bidang Peraturan atau Perundang-undangan diantaranya:
- Peraturan Walikota Metro No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual ;
  - Peraturan Walikota Metro No 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual ;
  - Peraturan Walikota Metro No 15 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual dan ;
  - Surat Edaran Walikota Metro No 900/1019/LTD-5/2014 tentang perubahan dan penyesuaian kode rekening anggaran pendapatan dan belanja pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar
- b) Kesiapan Sumber Daya Manusia  
Secara perundang-undangan dan Peraturan, Kota Metro telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi sistem akrual basis dan untuk dibidang kesiapan sumber daya manusia telah mumpuni yaitu dengan Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, dan Melaksanakan persiapan dan pemantapan instrumen untuk pengakuan standardisasi kualitas manajemen pelayanan keuangan daerah dalam menghadapi implementasi sistem akrual basis.
- c) Kesiapan Teknologi  
Persiapan di bidang teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro yaitu Melaksanakan penyesuaian program (pengadaan server dan install) teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari basis kas kepada basis akrual, sekaligus transfer keterampilan mengoperasikan peralatan tersebut kepada Tim Admin SIKPD BPKAD Kota Metro.

## **V.KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1.Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan terhadap 5 (lima) kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan secara administratif dan peraturan perundang-undangan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah memadai. Namun, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual antara lain:

- a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi sistem tersebut.
- b. Belum terintegrasinya sistem manajemen pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan, serta manfaat basis akrual belum dipahami oleh stakeholders.
- c. Adanya anggapan/opini bahwa sistem akuntansi berbasis akrual itu susah dan tidak penting.

## 5.2 Saran

Penelitian ini baru mencapai tingkat penyelesaian kurang-lebih 70% sehingga belum dapat menggambarkan profil kesiapan pemerintah Provinsi Lampung secara penuh dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Namun demikian, secara garis besar terdapat saran yang perlu disampaikan yakni perlunya penjadwalan oleh pihak pemerintah mengenai implementasi tersebut sehingga evaluasi atas implementasi memungkinkan untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chau, P.Y.K. 2006. An Empirical; Assessment of a Modified Technology Acceptance Model. *Journal of Management Information System*, 13 (2); 185-204.
- Compeau, DR., & Higgins, C. A., Huff, S. 2005. Social Cognitive Theory and Individual Reaction to Computing Technology: A Longitudinal Study. *MIS Quarterly*, 23 (2) 145-158.
- Davis, F.D, Bagozzi. R.P. & Warshaw. P.R. 2009. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models, *Management Science*, 35, 982-1003.
- Davis, F.D. 2009. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology, *MIS Quarterly*.
- Eikebrokk, R Tom dan Oeystein Sorebo. 2007. Technology acceptance insituations with alternative technologies: <http://nokobit.bi.no/nokobit>
- Gahtani, Al. and Said S. 2007. System Characteristics, User Perceptions and Attitudes in the Prediction of Information Technology Acceptance (A Structural Equation Model), *Administrative Sciences Dept King Khaled University, Abha Saudi Arabia*.
- Hofstede, G. 2005. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Edisi Kedua. Beverly Hills: SAGE Publications
- Kira, Dennis; Raafat George Saade; 2007; The Emotional State of Tehcnology Acceptance; <http://informingcience.org>
- Lewis, William, Ritu Agarwal dan V Sambamurthy. 2008. Source of Influence on Beliefs Information Technology Use: An Empirical; Study of Knowledge Worker, *MIS Quarterly* Vol. 27 No. 4
- Malhotra, Yogesh dan. Galletta, Dennis F. 2009, Extending the Technology Acceptance Model to Account for Social Influence: Theoretical Bases and Empirical Validation, *Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences*, USA.
- Mathieson, K. 2011. Predicting User Intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior, *Information Systems Research*, Vol. 2, pp.173-191.
- Ndubisi, Oli Nelson. 2005. Effect of Perception And Personal Traits On Computer Technology Adoption By Women Entrepreneurs In Malaysia; *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Petra S.M. Wijaya. 2005. Pengujian Model Penerimaan Teknologi Internet Pada Mahasiswa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1. Februari.
- Pikkarainen, et al. 2004. Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model *Internet Research Volume* 14 – Number 3 pp. 224-235
- Schillewaert, Niels. et al. 2010. The Acceptance of Information Technology in the Sales Force. Business Research Center *Working Paper*.
- Sun, Heshan dan Zhang, Ping. 2006. The Role Moderating Factors in User Technology Acceptance. *Int. J. Human-Computer Studies*. No. 63, hal.53-78.
- Venkatesh, V, & Morris M. G. 2010. Why Don't Men Ever Stop to Ask for Direction? Gender, Social Influence and their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior. *MISS Quarterly*, Vol. 24 No. 1, March.
- Wahyudi, Nanang. 2006, Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Reputasi Perusahaan, Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah, *Tesis Universitas Stikubank*, Tidak dipublikasikan
- Xiao, xue; Heshan Sun. 2006. User Acceptance of Virtual Technologies; <http://web.syr.edu>
- Yi Y Mun, Yujong Hwang. 2012. Predicting The Use Of Web Based Information Systems: Intrinsic Motivation And Self Efficacy, *Eighth Americas Conference on Information Systems*
- Zhang, Ping, Heshan Sun. 2006. An Empirical Study on Causal Relationships between Perceived Enjoyment and Perceived Ease